



# Akselerasi Aksi dan Kontribusi Sektor Swasta dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

November 2022



# Daftar Isi

- 03** Tentang Ringkasan ini
- 04** Temuan Utama
- 05** Pengantar: mengukur tindakan perusahaan untuk mencapai TPB
- 07** Keselarasan Rencana Aksi Nasional TPB dan kuesioner CDP
- 08** Memantau TPB melalui pelaporan perusahaan
- 11** Bagaimana menurut data?
- 12** Penurunan emisi karbon
- 14** Aksi untuk mengurangi emisi karbon
- 15** Perlindungan hutan untuk mencapai TPB
- 17** Langkah maju terkait hutan yang berkelanjutan
- 18** Membatasi perubahan iklim dan deforestasi melalui peningkatan aksi perusahaan
- 19** Studi Kasus: Bank Tabungan Negara (BTN)
- 20** Studi Kasus: Austindo Nusantara Jaya (ANJ)
- 21** Studi kasus: Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas
- 22** Rekomendasi
- 24** Daftar Pustaka

## Tentang ringkasan ini

76



40

**Pertumbuhan jumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan indikator terkait TPB pada tahun 2020-2021.**

**Untuk membantu para pembuat kebijakan meningkatkan aksi sektor swasta dan memastikan pelaporan yang berarti, kita memerlukan kewajiban pelaporan yang terstandarisasi. Hal ini akan membantu pemantauan aksi dan progres sektor swasta dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).**

Di Indonesia, perusahaan-perusahaan semakin menyadari pentingnya persoalan terkait keberlanjutan, termasuk risiko dan peluang dari dampak perubahan iklim dan deforestasi terhadap kegiatan operasionalnya. Perusahaan-perusahaan ini mulai melibatkan TPB, yang ditetapkan melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang ditunjukkan dengan peningkatan pelaporan melalui CDP. Antara tahun 2020 dan 2021, jumlah perusahaan yang melaporkan indikator terkait TPB bertambah dari 40 menjadi 76.

Pelaporan melalui CDP memberikan informasi bagi pembuat kebijakan mengenai tindakan yang diambil sektor swasta untuk mencapai TPB. Ringkasan kebijakan ini menganalisis data dari laporan perusahaan Indonesia melalui kuesioner perubahan iklim dan hutan CDP, terhadap kontribusi sektor swasta untuk mencapai Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk melandasi keputusan di masa mendatang. Analisis ini menggunakan data yang dilaporkan melalui kuesioner CDP 2021 bersama dengan dua tujuan utama TPB, yakni 'Penanganan Perubahan Iklim' (Tujuan 13) dan 'Ekosistem Daratan' (Tujuan 15), dan menunjukkan pelaporan melalui CDP akan menjadi alat penting untuk membantu Indonesia untuk mencapai TPB dan target lingkungan nasional lainnya.

Ringkasan ini juga berfokus pada unsur-unsur pengelolaan risiko dan peluang, metrik dan target, dan kaitannya komitmen TPB di Indonesia. Ringkasan ini ditutup dengan contoh tindakan perusahaan yang baik, yang dilaporkan melalui CDP pada tahun 2021.

74

perusahaan di Indonesia telah melaporkan melalui kuesioner perubahan iklim

7

perusahaan di Indonesia telah melaporkan melalui kuesioner hutan

# Temuan Utama



**1** Pada tahun 2021, semakin banyak perusahaan yang melaporkan melalui CDP tengah menetapkan target penurunan emisi (42%). Target ini setara dengan 26,23 juta metrik ton CO<sub>2</sub>e atau 1,22% dari total penurunan emisi Indonesia yang diproyeksikan untuk tahun 2030 dari semua sektor selain hutan dan pemanfaatan lahan lainnya (forest and other landuse atau “**FOLU**”).



**2** Namun, hanya 28% perusahaan pelapor yang menetapkan target penurunan emisi intensitas gas rumah kaca (GRK). Penetapan target ini penting dilakukan jika perusahaan akan berkontribusi terhadap pencapaian target RAN TPB, khususnya indikator 13.2.2(a) dan 13.2.2(b) pada Tujuan 13 dalam TPB.



**3** Terdapat peningkatan komitmen untuk mendukung keanekaragaman hayati, di mana 71% dari total perusahaan pelapor mendukung atau melaksanakan restorasi ekosistem, strategi rehabilitasi, dan tindakan perlindungan terhadap total area seluas 92.780 ha. Selain itu, 42% dari total perusahaan melaporkan komitmen untuk melindungi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan 14% melaporkan bahwa beberapa proyeknya melibatkan perlindungan spesies terancam punah seperti orang utan. Tindakan-tindakan ini mendukung pencapaian target RAN Indonesia untuk TPB, khususnya indikator 15.1.2(a), 15.3.1, dan 15.5.1 pada Tujuan 15.



**4** Pelaporan kinerja perusahaan yang bersifat wajib dapat meningkatkan aksi dan progres sektor swasta dalam mencapai TPB serta meningkatkan kinerja aspek lingkungan melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*).

# Pengantar



# Pengantar:

## Mengukur tindakan perusahaan untuk mencapai TPB

**Dunia tengah menghadapi berbagai risiko lingkungan, ekonomi, dan sosial. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat telah memunculkan perhatian terhadap persoalan yang mengancam masyarakat, ekosistem, dan bisnis. Hal ini menjadi tantangan bagi keberhasilan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang merupakan kerangka kerja yang diterapkan untuk melacak kemajuan global terhadap pencapaian TPB.**

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam Agenda Pembangunan berkelanjutan termasuk TPB dengan menerbitkan Peraturan Presiden<sup>1</sup>. Pemerintah baru-baru ini memperbarui komitmennya dengan kerangka waktu yang baru dan tindakan yang lebih terukur sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024<sup>2</sup>.

Dalam rangka membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5°C, Pemerintah telah berkomitmen terhadap transisi ke emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia telah memperbarui skenario Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional yang Ditingkatkan (*Enhanced National Determined Contribution* atau ENDC) untuk menurunkan emisi sebesar 31,9% secara unilateral, atau 43,2% dengan dukungan internasional, pada tahun 2030<sup>3</sup>. Proses transisi akan menciptakan suatu norma baru di dalam dan seluruh sektor bisnis, yang mana hal ini penting mengingat risiko dan peluang terkait iklim semakin bergerak cepat baik dari segi skala maupun cakupan. Terus dilakukannya praktik yang berlangsung saat ini (*business as usual* atau BAU) akan menghadirkan risiko terhadap perusahaan, dan tidak dilakukannya tindakan akan dianggap sebagai hal negatif dan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pemangku kepentingan kunci.

Keterlibatan aktif dari perusahaan, lembaga keuangan, dan aktor non-pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk mencapai TPB Indonesia sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Tinjauan Nasional Sukarela (*Voluntary National Review* atau VNR) Indonesia yang dilakukan setiap dua tahun<sup>4</sup>.

**Terdapat beragam cara agar bisnis dapat berpartisipasi dalam agenda TPB, baik dalam hal permasalahan yang masuk cakupan bisnis masing-masing untuk ditangani maupun alat yang digunakan. Untuk melacak kemajuan secara efektif, kontribusi harus dipantau secara terperinci.**

Guna mengatasi hal ini, Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah terkait peraturan untuk mendorong dan mengoordinasikan kontribusi sektor swasta. Langkah-langkah tersebut mencakup penerbitan Peraturan Presiden No. 59/2017 yang kemudian diperbarui dengan penerbitan Peraturan Presiden No. 111/2022 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan, dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (Program for Environmental Performance Rating/PROPER).

Mengingat sifat persoalan terkait iklim dan hutan yang saling bersinggungan, terdapat kebutuhan yang mendesak akan data berkualitas tinggi. Hal ini dapat membantu pemangku kepentingan mengetahui kemajuan perusahaan dalam memenuhi tujuan berkelanjutan dan efektivitas peraturan yang dilaksanakan. Investasi lebih lanjut dalam infrastruktur data dan informasi sama-sama dibutuhkan. Perusahaan dapat menilai kontribusinya terhadap pencapaian TPB dengan menggunakan platform pelaporan CDP. Dalam melakukan hal ini, pelaporan lingkungan perusahaan dapat ditingkatkan di semua sektor membangun perubahan yang positif dan untuk memenuhi tujuan terkait aspek berkelanjutan di Indonesia<sup>5</sup>.

# Keselarasan Rencana Aksi Nasional TPB dan kuesioner CDP

# 47%

indikator lingkungan dalam RAN TPB Indonesia selaras dengan kuesioner CDP.

**Berdasarkan analisis mengenai keselarasan antara kuesioner CDP dengan indikator TPB secara global, diketahui bahwa platform pelaporan CDP menangkap informasi-informasi yang relevan di keenam tujuan terkait lingkungan dalam TPB<sup>6</sup>. Kegiatan pemetaan tambahan terhadap kuesioner CDP menunjukkan bahwa kuesioner ini selaras dengan 36 dari 77 (47%) indikator lingkungan dalam RAN TPB Indonesia<sup>7</sup>.**

Dalam ringkasan ini, kami berfokus pada Tujuan 13 dalam TPB karena tujuan ini mendapatkan perhatian yang signifikan dalam Tinjauan Nasional Sukarela (VNR) yang diterbitkan antara tahun 2016 dan 2019, termasuk di Indonesia<sup>8</sup>, dan menunjukkan kesadaran yang luas terhadap tantangan dari perubahan iklim. Kami juga berfokus pada Tujuan 15 dalam TPB mengingat relevansinya dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pemanfaatan Lahan lain (*agriculture, forestry, and other land use* atau AFOLU)<sup>9</sup>. Sektor ini bertanggung jawab terhadap 55% target penurunan emisi Indonesia pada dokumen ENDC sehingga menjadi sangat relevan terhadap pencapaian Tujuan 15 dalam TPB.

Table 1: keselarasan data CDP dengan Tujuan 13 dan 15 dalam TPB

Nomor TPB	RAN untuk Indikator TPB		Kontribusi Kumpulan Data Tematik CDP	
	Kode	Indikator	Perubahan iklim	Hutan
 <b>13</b> Penanganan Perubahan Iklim	13.2.2	Total emisi GRK tahunan	✓	
	13.2.2 (a)	Potensi untuk menurunkan intensitas emisi GRK	✓	✓
	13.2.2 (b)	Potensi untuk menurunkan emisi GRK	✓	✓
 <b>15</b> Ekosistem Daratan	15.1.2.(a)	Kawasan dengan NKT	✓	✓
	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)	✓	✓
	15.3.1	Proporsi lahan terdegradasi terhadap total luas lahan	✓	✓
	15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan TSL ilegal	✓	

Dengan memetakan kuesioner CDP di seluruh indikator TPB dalam RAN Indonesia, cara bisnis menafsirkan risiko, peluang, dan target terkait persoalan perubahan iklim dan hutan dapat diketahui. Selain itu, tindakan yang dilakukan untuk mengelola risiko, menetapkan peluang, dan mencapai target ini dapat dikenali dan dalam jangka panjang akan berkontribusi terhadap pencapaian TPB Indonesia.

# Melacak TPB melalui pelaporan perusahaan

# 2

# Melacak TPB melalui pelaporan perusahaan

# 23%

dari total perusahaan telah mengembangkan tindakan atau strategi khusus untuk TPB tertentu.

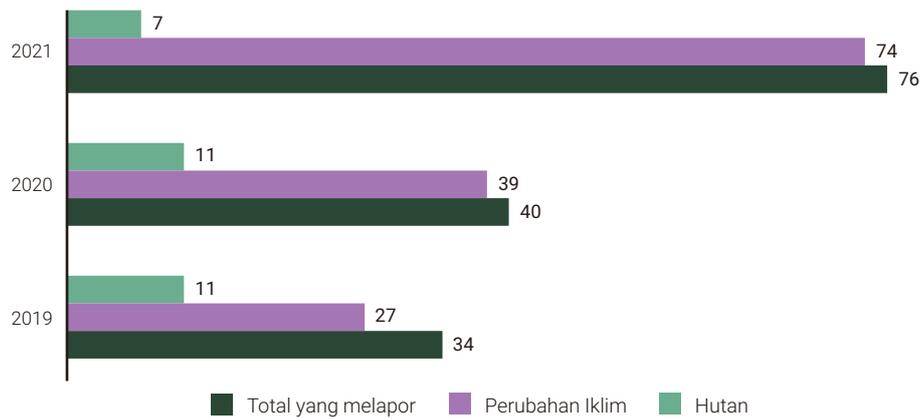
**Ketujuh belas tujuan TPB secara gamblang menyerukan agar bisnis mengambil tindakan dan berkontribusi pada subtargetnya masing-masing<sup>10</sup>. Namun, transparansi dalam memahami sejauh mana sektor bisnis berpartisipasi dalam pencapaian TPB masih rendah.**

Riset terhadap 500 perusahaan top dunia (Fortune Global Top 500) menunjukkan bahwa 32,6% perusahaan cenderung menyesuaikan praktik bisnis sebagaimana biasanya dengan TPB yang relevan, daripada menerapkan inisiatif baru. Hanya terdapat 23% dari total perusahaan yang telah mengembangkan tindakan atau strategi khusus untuk TPB tertentu<sup>11</sup>.

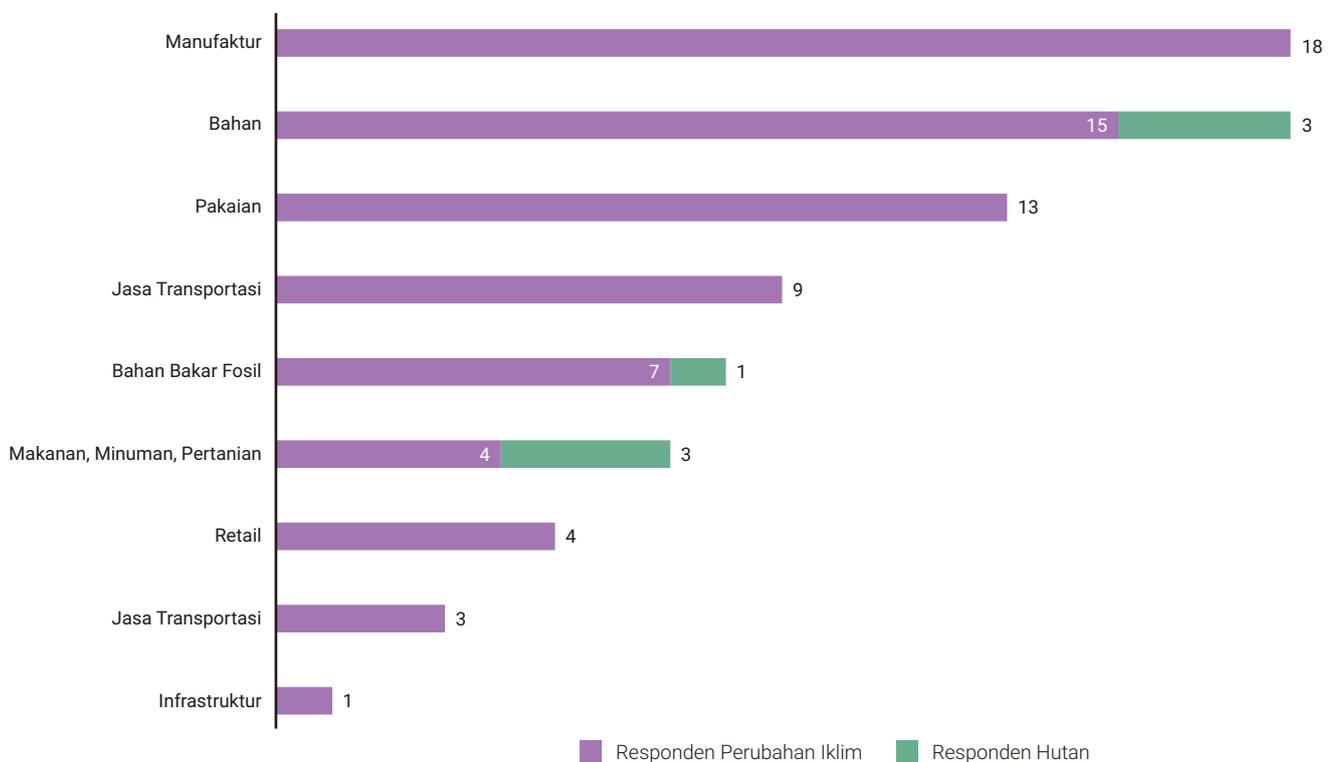
Di Indonesia, beberapa badan usaha multinasional mengklaim bahwa partisipasi awalnya dalam pencapaian TPB dimaksudkan untuk kepatuhan terhadap peraturan. Hanya target-target wajib yang dipertimbangkan ketika direksi perusahaan mulai mempertimbangkan persoalan keberlanjutan<sup>12</sup>. Dengan memahami tingkat kesadaran dan komitmen sektor swasta serta pelaporan informasi tindakan lingkungan, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi cara mempercepat pelaksanaan upaya yang kuat secara luas.

CDP telah mendukung perusahaan secara global dengan menyediakan platform untuk melaporkan tindakannya dan menyelaraskan tindakan tersebut dengan praktik terbaik internasional. Pada tahun 2021, lebih dari 13.000 perusahaan diseluruh dunia melaporkan data melalui CDP setara dengan lebih dari setengah kapitalisasi dari pasar global, sedangkan di Indonesia dari 222 perusahaan Indonesia yang diminta untuk melakukan pelaporan, 76 di antaranya melaporkan tindakannya melalui CDP. Dari jumlah ini, sebanyak 74 perusahaan melaporkan tindakannya terkait energi dan emisi melalui kuesioner perubahan iklim. Terlepas dari relatif rendahnya jumlah perusahaan yang melapor, pelaporan di Indonesia telah meningkat secara stabil sejak tahun 2019, dari 34 perusahaan pelapor menjadi 40 di tahun 2020 dan 76 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran persoalan lingkungan di dalam dan di seluruh kegiatan perusahaan.

Gambar 1: Jumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan melalui CDP



Gambar 2: Kategori industri primer dari perusahaan yang melaporkan di Indonesia



Hanya terdapat tujuh perusahaan yang melaporkan tindakan mengenai penanganan deforestasi di Indonesia (dibandingkan dengan total 865 perusahaan secara global). Meski jumlah pelapor masih rendah, perusahaan-perusahaan ini menyediakan beberapa komoditas yang berisiko terhadap hutan, seperti sawit, kayu, kedelai, coklat, dan kopi. Dari kelima komoditas ini, tiga di antaranya termasuk ke dalam produk terbaik Indonesia berdasarkan klasifikasi oleh Kementerian Perdagangan Indonesia<sup>13</sup>. Namun, jumlah perusahaan yang melaporkan tindakannya untuk menangani deforestasi masih belum memadai. Dalam rangka menghapus deforestasi dari rantai pasok dan beralih menuju masa depan yang berpihak pada hutan, desakan agar pengungkapan perusahaan menjadi suatu norma terus meningkat.

# Bagaimana menurut data?

Temuan dari pelaporan  
tahun 2021



# 3

# Penurunan emisi karbon

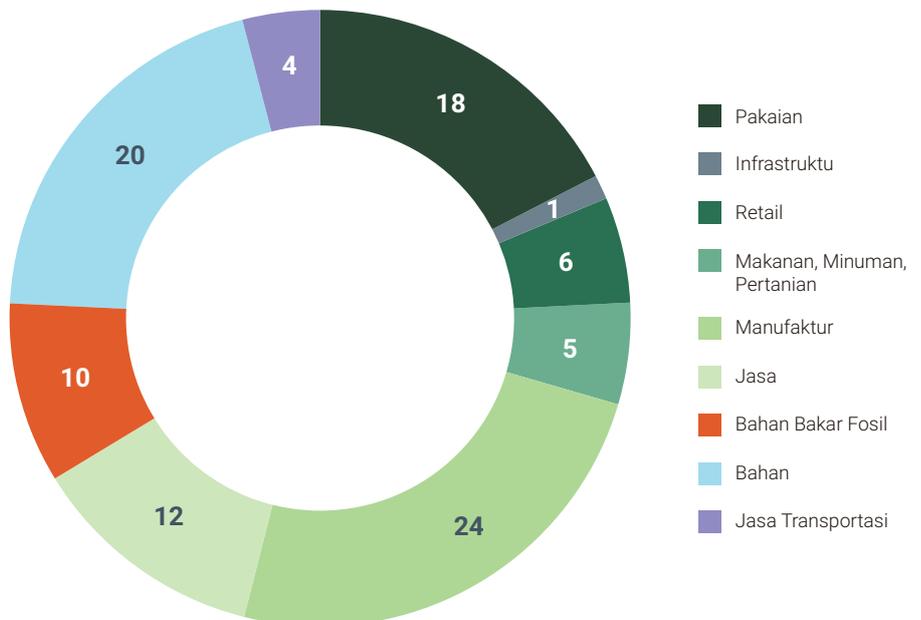
Penetapan target membantu mendemonstrasikan komitmen suatu perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan isu terkait perubahan iklim pada tingkat korporasi.

Satu unsur utama dalam Tujuan 13 dalam TPB adalah target penurunan emisi. Penetapan target memberikan arah dan struktur untuk strategi lingkungan serta informasi mengenai tujuan kuantitatif dan kualitatif dan kemajuan yang dicapai terhadap target.

Hal ini membantu menunjukkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan persoalan terkait iklim di tingkat perusahaan. Informasi ini relevan bagi pembuat kebijakan untuk memberikan pemahaman mengenai cara perusahaan mengatasi dan memantau kemajuan komitmennya.

Pemerintah telah menetapkan target untuk lima sektor yang melepaskan emisi karbon terbesar. Ini mencakup FOLU, Energi, Pertanian, Limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk (*Industrial Process and Product Uses* atau IPPU). Perusahaan Indonesia yang melaporkan melalui CDP (Gambar 3) juga berkontribusi terhadap kelima sektor dengan emisi karbon terbesar yang diklasifikasikan oleh Pemerintah<sup>14</sup>.

Gambar 3: Uraian industri yang memberikan respons melalui kuesioner perubahan iklim CDP tahun 2021



Tabel 3: Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi Tujuan 13 dalam TPB

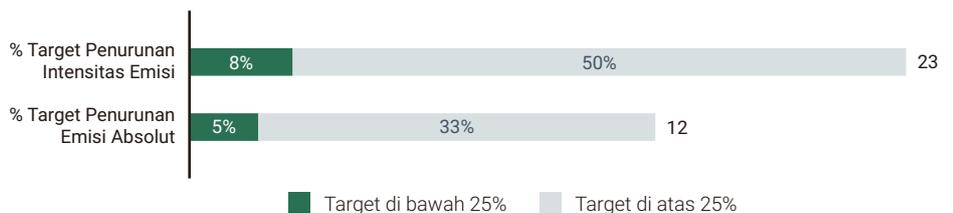
Nomor TPB	Rencana Aksi Nasional untuk Indikator TPB		Keselarasan Kumpulan Data Tematik CDP	
	Kode	Indikator	Pertanyaan Perubahan Iklim	Hasil Indikator
 <b>Climate Action</b>	13.2.2 (a)	Potensi untuk menurunkan emisi GRK.	[C4.1a] Berikan perincian mengenai target emisi absolut <sup>15</sup> dan kemajuan dalam mencapai target tersebut.	Sebanyak 42% dari total perusahaan pelapor telah menetapkan target penurunan emisi GRK absolut target.
	13.2.2 (b)	Potensi untuk menurunkan intensitas emisi GRK.	[C4.1b] Berikan perincian mengenai target emisi intensitas <sup>16</sup> dan kemajuan dalam mencapai target tersebut.	Sebanyak 28% dari total perusahaan pelapor telah menetapkan target penurunan emisi intensitas GRK.

Tabel 3 menunjukkan keselarasan antara RAN TPB dengan kuesioner perubahan iklim CDP. Tabel ini mengilustrasikan potensi kontribusi sektor swasta terhadap beberapa unsur Tujuan 13 dalam TPB. Namun, dari ketiga poin data CDP yang selaras dengan TPB sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, hanya dua poin data yang menyajikan data yang memadai untuk analisis lebih lanjut. Mengingat besarnya rentang target penurunan emisi yang dilaporkan oleh perusahaan, target penurunan emisi absolut dan intensitas emisi rata-rata dikelompokkan menjadi dua, yakni target di bawah 25% dan target di atas 25%. Dari total 74 perusahaan, 23 di antaranya menetapkan target penurunan emisi absolut dan/atau emisi intensitas di bawah 25% dibandingkan dengan BAU, sementara 12 perusahaan lainnya menetapkan target di atas 25%.

**55%**

perusahaan pelapor (41) telah menetapkan target penurunan emisi GRK baik berupa target absolut maupun target intensitas emisi.

Gambar 4: Jumlah rata-rata target penurunan emisi absolut dan intensitas emisi yang dilaporkan



Data CDP juga menunjukkan bahwa 18 perusahaan melaporkan target penurunan emisi absolut. Secara keseluruhan, besar target ini merepresentasikan 26,23 juta metrik ton CO<sub>2</sub>e dan setara dengan 1,22% total penurunan emisi yang diproyeksikan untuk tahun 2030 dari semua sektor selain FOLU<sup>17</sup>. Target penurunan emisi total ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020, dengan hanya 11 perusahaan yang melaporkan gabungan target penurunan emisi absolut sebesar 4,30 juta metrik ton CO<sub>2</sub>e. Peningkatan jumlah target yang dilaporkan ini menunjukkan semakin meningkatnya ambisi di antara perusahaan di Indonesia dan kesadaran seputar risiko terkait iklim dan hutan. Namun, selain dari meningkatnya kesadaran untuk menetapkan target tersebut, tindakan dari sektor swasta juga sama pentingnya. Guna memastikan pencapaian target iklim nasional, sektor swasta harus meningkatkan dan mempercepat tindakannya untuk melengkapinya komitmen perusahaannya.

# Aksi untuk mengurangi emisi karbon

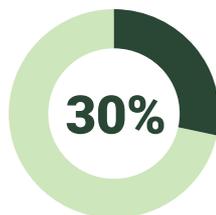
TCFD merekomendasikan agar bisnis memfokuskan tindakannya pada empat bidang tematik yang mewakili unsur inti operasi perusahaan<sup>20</sup>:

-  tata kelola;
-  strategi;
-  manajemen risiko;
-  metrik dan target.

**Gagal melakukan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim merupakan ancaman paling utama terhadap keamanan global dan sangat berpotensi merusak masyarakat, ekonomi, dan bumi<sup>18</sup>.**

Bagi bisnis, risiko terkait iklim dapat berdampak terhadap kegiatan-kegiatan di sepanjang rantai nilai. Dampak ini diakibatkan risiko transisi dan fisik beserta konsekuensi keuangan terhadap ekonomi global. Semua risiko dan konsekuensi ini dapat menghambat pencapaian TPB.

Gugus Tugas Pelaporan Keuangan terkait Iklim (Taskforce Climate-related Financial Disclosure atau TCFD) yang dibentuk oleh Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board atau FSB)<sup>19</sup>, telah menyusun serangkaian rekomendasi untuk mendukung perusahaan dalam memberikan informasi yang lebih baik untuk alokasi modal yang didasarkan pada informasi.



**Data CDP menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sebanyak 23 (lebih dari 30%) perusahaan melaporkan bahwa mereka sadar akan risiko terkait iklim dalam bisnisnya.**

Risiko yang paling sering dilaporkan adalah risiko peraturan, dan diikuti dengan risiko pasar. CDP juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan sangat mempertimbangkan risiko yang meningkatkan biaya tidak langsung, misalnya fenomena cuaca ekstrem, perubahan perilaku pelanggan, dan biaya penggantian alat yang ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan mempertimbangkan peningkatan biaya operasi dan penurunan pendapatan karena penurunan permintaan akan produk dan jasa mereka.

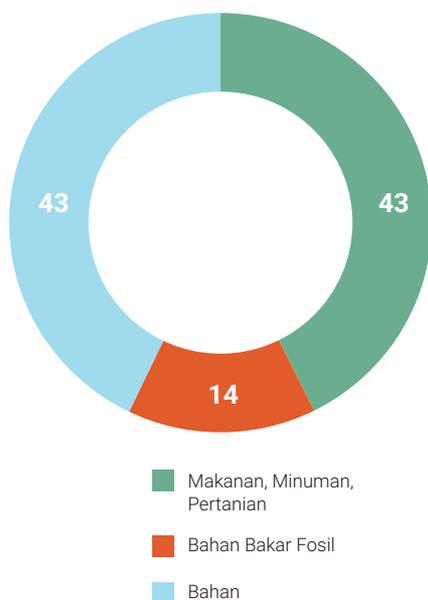


**Namun demikian, perubahan iklim juga menawarkan peluang bagi perusahaan. Pada tahun 2021, sebanyak 25 perusahaan (34%) melaporkan peluang terkait iklim dalam operasi langsung mereka, dalam bentuk sumber energi baru, pembukaan pasar baru, efisiensi sumber daya, serta produk dan jasa baru.**

**Berbagai peluang yang teridentifikasi memiliki nilai keuangan yang signifikan, dengan total mencapai 3,5 miliar Dolar AS.** Nilai ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan peluang terkait iklim di antara perusahaan-perusahaan Indonesia. Kesadaran ini harus ditingkatkan agar menjadi norma dan memberikan hasil yang bermanfaat.

# Perlindungan hutan untuk mencapai TPB

Gambar 5: Industri primer yang mengisi kuesioner hutan CDP 2021



## 71%

(5) perusahaan melaporkan memiliki kebijakan dan komitmen terkait hutan.

## 43%

(3) perusahaan melaporkan memiliki kebijakan yang kuat selaras dengan praktik terbaik.

**Emisi karbon mewakili salah satu unsur tantangan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk mengatasi persoalan terkait iklim secara menyeluruh, bisnis perlu mengkaji lebih mendalam risiko ekologis selain perubahan iklim, misalnya risiko terkait hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan gambut, dan deforestasi.**

Risiko terkait alam yang lebih luas terhadap bisnis dan ekonomi secara cepat dikenali sebagai permasalahan kunci dikarenakan lebih dari setengah ekonomi global bergantung pada alam<sup>21</sup>. Hutan merupakan unsur penting bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat, karena menyediakan serangkaian jasa ekosistem mendasar untuk kesejahteraan ekologi dan sosial<sup>22</sup>. Setiap risiko yang terjadi pada hutan akan berhubungan dengan perubahan iklim. Hutan adalah kunci dalam menangani perubahan iklim karena dapat menjadi sumber emisi jika lahannya dibuka, sebaliknya menjadi penyerap emisi jika dikonservasi. Sektor penggunaan lahan, khususnya hutan, berpotensi mengurangi emisi global hingga 30% untuk mencapai target iklim tahun 2050<sup>23</sup>. Oleh karena itu, mengatasi deforestasi, serta konservasi dan restorasi hutan sangat penting untuk mencapai SDG 13 dan SDG 15.

Pemerintah Indonesia menyadari peran penting yang dimiliki hutan dan menempatkannya sebagai pusat strategi mitigasi. Salah satunya adalah target Penyerapan Karbon Bersih pada sektor FOLU (FOLU *Net Sink*) 2030<sup>24</sup>. Target ini akan dicapai melalui penerapan moratorium izin baru pemanfaatan lahan, restorasi ekosistem, dan peningkatan pengelolaan hutan primer dan lahan gambut<sup>25</sup>. Kontribusi sektor swasta sangat penting dalam mencapai target nasional ini.

Di Indonesia, kawasan hutan seluas 38 juta ha telah diidentifikasi sebagai Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HBKT). Dari jumlah tersebut, sebanyak hampir 4% di antaranya diidentifikasi berisiko tinggi sehingga harus dilindungi<sup>26</sup>. Perlindungan hutan (baik di kawasan konservasi yang ada maupun baru) harus ditingkatkan guna menjamin perlindungan dan restorasi keanekaragaman hayati.

Melalui platform pelaporan CDP, tujuh perusahaan Indonesia melaporkan tindakannya untuk mengelola risiko terkait hutan dan mengeluarkan deforestasi dari rantai pasoknya. Perusahaan yang dilaporkan tersebut dicantumkan dalam beberapa sektor, yaitu makanan, minuman, dan pertanian (43%), bahan (43%), dan bahan bakar fosil (14%) (lih. Gambar 5).

Table 4: Tindakan yang dilakukan perusahaan terkait Tujuan 15 dalam TPB

Nomor TPB	Rencana Aksi Nasional untuk Indikator TPB		Keselarasan Kumpulan Data Tematik CDP	
	Kode	Indikator	Pertanyaan Kuesioner Hutan	Hasil Indikator
 <p>15 Ekosistem Daratan</p>	15.1.2 (a)	Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	[F4.6b] Apakah perusahaan Indonesia telah membuat komitmen publik untuk mengurangi atau menghentikan deforestasi dan/atau degradasi hutan akibat operasi langsung dan/atau rantai pasok perusahaan Indonesia?	Sebanyak 42% dari total perusahaan melaporkan berkomitmen untuk tidak mengonversi kawasan NKT. Komitmen ini diikuti dengan komitmen lainnya, misalnya selaras dengan TPB dan melaksanakan komitmen tanpa deforestasi, tanpa pengembangan di lahan gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE).
	15.3.1	Mencapai lahan dan hutan yang telah direhabilitasi dengan luas tertentu	[F6.11a] Berikan perincian lebih lanjut mengenai proyek Indonesia, termasuk luas, durasi, dan frekuensi pemantauan (luas area proyek dalam ha).	Sebanyak 71% dari total perusahaan mendukung atau melaksanakan strategi restorasi dan rehabilitasi ekosistem serta upaya perlindungan terhadap kawasan dengan total luas 92.780 ha.
	15.5.1*	Indeks Daftar Merah	[F6.11a] Berikan perincian lebih lanjut mengenai proyek Anda, termasuk luas, durasi, dan frekuensi pemantauan. Jelaskan setiap hasil yang telah diukur.	Sebanyak 14% dari total perusahaan melaporkan bahwa beberapa proyek mencakup perlindungan terhadap orang utan yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN, di mana populasi orang utan meningkat dari 150 menjadi 200 pada tahun 2020. Temuan ini selaras dengan peraturan terbaru Indonesia yaitu Peraturan Presiden No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang menargetkan 25 spesies tanaman dan hewan.

Tabel 4 menyoroti tindakan yang dilakukan perusahaan terkait Tujuan 15 dalam TPB berdasarkan pelaporan dari kuesioner hutan CDP. Akan tetapi, dari tiga poin data CDP yang selaras dengan TPB (Tabel 1), hanya dua poin data yang memadai untuk analisis lebih lanjut. Keselarasan ini dapat memberikan informasi tentang seberapa besar kontribusi sektor swasta terhadap unsur terkait RAN untuk TPB.

Sebagai langkah awal dalam menghapus deforestasi dari rantai pasok, perusahaan diharapkan dapat memberlakukan kebijakan dan komitmen Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (*No. Deforestation, No. Peatland, and No. Exploitation* atau NDPE). Data yang dilaporkan kepada CDP menunjukkan bahwa sebanyak 5 perusahaan (71%) melaporkan bahwa mereka memiliki kebijakan dan komitmen terkait hutan, tetapi hanya 3 perusahaan (43%) yang melaporkan kebijakan yang kuat dan selaras dengan praktik terbaik<sup>27</sup>.

Melalui CDP, perusahaan juga melaporkan apabila melakukan proyek restorasi dan/atau perlindungan ekosistem beserta cara pelaksanaannya. Ada 5 perusahaan (71%) yang melaporkan bahwa mereka berpartisipasi dan/atau melaksanakan proyek-proyek tersebut pada tahun 2021. Proyek ini mencakup inisiatif restorasi ekosistem hutan di kawasan konservasi yang terdapat di lokasi pemasoknya, restorasi fungsi ekosistem sungai guna memperkuat daerah tangkapan air dan mencegah erosi, serta pencadangan kawasan pemulihan NKT untuk meningkatkan penyerapan karbon.

Temuan-temuan ini menegaskan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan restorasi dan perlindungan ekosistem. Guna menghentikan deforestasi dan mengembalikan fungsi hutan untuk menyimpan karbon, tindakan perusahaan harus dipercepat dan ditingkatkan agar Tujuan 15 TPB dapat terpenuhi. Perusahaan-perusahaan Indonesia harus melaporkan lebih jelas agar pembuat keputusan dapat melacak dengan lebih baik kemajuan dalam mencapai Tujuan 15 TPB.

# Langkah maju terkait hutan yang berkelanjutan

## Kuesioner hutan CDP memberikan kerangka kerja bagi perusahaan dalam perjalanan mereka untuk mencapai rantai pasok yang bebas deforestasi.



Berdasarkan sudut pandang risiko, kuesioner tersebut dapat membantu perusahaan untuk memahami paparan mereka sehubungan dengan risiko terkait hutan yang dapat menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang signifikan terhadap bisnis mereka. Ada 4 perusahaan (64%) yang melaporkan risiko fisik (misalnya kebakaran hutan) sebagai risiko paling utama terkait produksi atau pengadaan komoditas yang berisiko terhadap hutan.



Kabar baiknya, pada tahun 2021, sebanyak 5 perusahaan (71%) melaporkan bahwa mereka telah mengidentifikasi peluang terkait hutan, seperti peningkatan permintaan akan bahan bersertifikat dan peningkatan ketersediaan produk dengan dampak yang telah berkurang terhadap lingkungan. Dari total perusahaan tersebut, 4 (80%) di antaranya termasuk dalam sektor minyak sawit. Selain itu, semua perusahaan merespons bahwa mereka mengetahui peluang untuk memasok produk dan bahan bersertifikat. Hal ini sesuai dengan arahan tahun 2025 Menteri Pertanian Indonesia tentang sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani<sup>28</sup>.



Data CDP menunjukkan bahwa 71% dari perusahaan yang memberi laporan bertujuan meningkatkan produksi dan/atau konsumsi berkelanjutan komoditas yang dilaporkannya. Walaupun 4 perusahaan (57%) melaporkan bahwa mereka telah menetapkan target untuk meningkatkan kemampotelusuran komoditas yang dipasok dan/atau untuk meningkatkan volume produk bersertifikat pihak ketiga, hanya 14% yang melaporkan bahwa mereka telah mencapainya atau membuat kemajuan yang linear untuk memenuhi target tersebut.



**Membatasi perubahan iklim dan deforestasi melalui peningkatan aksi perusahaan**

**4**

# Membatasi perubahan iklim dan deforestasi melalui peningkatan aksi perusahaan

## Dengan memberikan laporan kepada CDP, perusahaan dapat menegaskan kontribusi mereka untuk mencapai TPB.

Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan, mendorong kepemimpinan, dan meningkatkan efisiensi perencanaan. Studi kasus di bawah ini menyoroti tiga perusahaan Indonesia yang berupaya mencapai TPB.

## Studi Kasus Bank Tabungan Negara (BTN)

**US\$  
180.000**

dialokasikan oleh  
BTN untuk memenuhi  
peraturan pemerintah  
dan implementasi  
bermacam pengukuran.

**3,000**   
**pohon**

bibit telah ditanamkan  
diperumahan subsidi.

- ▶ BTN (Bank Tabungan Negara) adalah bank umum milik negara, yang paling dikenal sebagai bank hipotek. BTN telah menyiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2019–2023 beserta RAKB 2020–2024 yang memaparkan komitmen keberlanjutan BTN.
- ▶ Pada tahun 2021, BTN mengurangi 31% emisi GRK dibandingkan dengan data dasar (*baseline*) 2018. BTN telah mengidentifikasi risiko terkait iklim dengan potensi dampak keuangan hingga 280.000 Dolar AS. Sebagian besar risiko ini akan timbul dalam operasi langsung rantai nilainya. Menanggapi risiko tersebut, BTN mengalokasikan **180.000 Dolar AS** untuk mematuhi peraturan Pemerintah dan menerapkan berbagai langkah termasuk penanaman 3.000 bibit pohon di perumahan bersubsidi, peralihan ke sumber energi terbarukan untuk pengadaan kantor, dan pengelolaan instalasi pengolahan limbah yang lebih baik<sup>29</sup>.
- ▶ Mengingat KPR merupakan produk utama BTN, upaya keberlanjutannya difokuskan pada sektor konstruksi. Salah satu inisiatif yang masuk dalam RAKB 2020–2024 adalah Pembiayaan Konstruksi Hijau yang membiayai pembangunan perumahan vertikal dengan konsep Pembangunan Berorientasi Transit (*Transit-Oriented Development/ TOD*), pembangunan infrastruktur, dan pengembangan pariwisata. BTN selanjutnya berkomitmen untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, mengadopsi peraturan pelabelan ramah lingkungan (*eco-labelling*), dan/atau mempromosikan penggunaan bahan bersertifikat ramah lingkungan untuk memastikan bahwa konstruksi memenuhi kriteria GreenShip Homes yang disusun oleh Dewan Bangunan Hijau (Green Building Council) di Indonesia. Perusahaan ini tercatat dalam Indeks SRI-KEHATI pada tahun 2020 setelah berkomitmen terhadap target lingkungan beserta tindakan pengembangan sosial dan tata kelola perusahaan yang baik<sup>30</sup>.

## Studi Kasus

# Austindo Nusantara Jaya (ANJ)

## US\$10

juta

teridentifikasi sebagai potensi dampak keuangan dari risiko hutan.

## 98.5%

lacak balak

sampai pekebun pihak ketiga, telah tercapai pada tahun 2021.

**Sebagai salah satu perusahaan induk komoditas pertanian terbesar di Indonesia. ANJ berkomitmen untuk memenuhi janji emisi nol bersih pada tahun 2030, lebih cepat dari target tahun 2060 yang ditetapkan Pemerintah.**

- ▶ Pada tahun 2021, ANJ telah mengurangi emisi GRK sebesar **76%** dan intensitas GRK sebesar **8,6%** dibandingkan dengan baseline tahun 2015. Pengurangan ini dikarenakan perluasan kawasan konservasi yang meningkatkan penyerapan karbon dalam operasinya. ANJ juga meningkatkan konsumsi energi terbarukan sebesar **20%** dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil sebesar **10,6%** dibandingkan tahun 2017<sup>31</sup>. Perusahaan ini telah mengidentifikasi kebakaran hutan sebagai risiko yang paling diantisipasi, dengan potensi dampak keuangan hingga **10 juta Dolar AS**<sup>32</sup>.
- ▶ Selain mengidentifikasi risiko, ANJ telah mengidentifikasi peluang terkait komoditas hutan dalam periode realisasi satu hingga enam tahun. Peluang dengan potensi dampak keuangan atau strategis yang substantif terhadap bisnisnya berkisar antara 300.000 hingga 2.500.000 Dolar AS. ANJ telah mengidentifikasi tingginya permintaan akan produk dengan dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan<sup>33</sup>.
- ▶ Perusahaan ini tampaknya berfokus untuk memperbaiki catatan pengelolaan rantai pasoknya dengan menjadikan kemamputelusuran sebagai unsur utama dari upaya keberlanjutannya. ANJ mengklaim telah mencapai lebih dari **98,5%** kemamputelusuran ke tingkat perkebunan dari sumber pihak ketiga pada tahun 2021<sup>34</sup>. ANJ melaporkan telah melakukan pelibatan terhadap 100% pemasok pabrik dengan peningkatan kesadartahuan terhadap isu kelertarian, termasuk pengenalan pada praktik pertanian terbaik. Sebagai tambahan, menyadari peran penting dari petani mandiri, ANJ telah melakukan penyuluhan kepada 590 petani mandiri termasuk perantara melalui peningkatan kapasitas dalam produksi kelapa sawit berkelanjutan<sup>35</sup>.

## Studi kasus

# Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas

- ▼ Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas adalah merk dagang perusahaan manufaktur pulp dan kertas. Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 APP berfokus pada tiga bidang utama yaitu produksi, hutan, dan manusia secara rinci. APP melalui kebijakan Sustainability Visions-nya bertujuan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan hingga 30% pada tahun 2030 dibandingkan baseline tahun 2018<sup>36</sup>.
- ▼ APP Sinar Mas telah mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim dan hutan. Risiko yang teridentifikasi berasal dari rantai pasok dikarenakan komoditas utama perusahaan rentan terhadap risiko terkait hutan. Saat ini, lebih dari 90% kayu pulp APP bersumber dari pengelolaan hutan lestari bersertifikat PEFC<sup>37</sup>.
- ▼ APP Sinar Mas telah menetapkan target untuk memastikan bahwa kurang dari 2% wilayahnya terkena dampak kebakaran hutan yang menekankan sinergi erat dengan pemasok kayu pulp, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya<sup>38</sup>.
- ▼ APP juga telah mengidentifikasi peluang baru termasuk akses terhadap pasar baru dan peningkatan efisiensi sumber daya dalam operasinya<sup>39</sup>. Meningkatnya permintaan akan produk dengan dampak lingkungan yang rendah semakin meningkatkan peluang mengakses pasar luar negeri. Beberapa pabrik APP kini menggunakan teknologi yang lebih hemat sumber daya daripada sebelumnya. Perusahaan melihat rencana penggantian peralatan ini beserta daur ulang kertas bekas sebagai peluang produksi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan<sup>40</sup>.



# Rekomendasi

## **Berdasarkan informasi terkini tentang target pembangunan berkelanjutan<sup>41</sup> dan RAN TPB, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mencapai TPB dan meningkatkan transparansi di seluruh sektor swasta di Indonesia.**

Peraturan baru Pemerintah yang diimplementasikan secara kuat dan menyeluruh dapat meningkatkan kontribusi aktor nonpemerintah dalam mendukung upaya pemerintah mencapai komitmen terkait keberlanjutannya. Selain itu, kualitas data semakin perlu ditingkatkan seiring dengan peningkatan manajemen pengumpulan data. CDP telah mengidentifikasi tiga rekomendasi khusus untuk membantu pembuat kebijakan meningkatkan aksi perusahaan dan memastikan dilakukannya pelaporan yang berarti.

### **1 Mewajibkan pelaporan oleh perusahaan**

Pengarusutamaan pelaporan yang terstandardisasi dan transparansi dalam operasi perusahaan adalah langkah mendasar untuk menunjukkan kontribusi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah, sekaligus memberikan sarana penyediaan data dan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan. Meskipun menjadi unsur penting untuk membangun ekonomi yang positif terhadap perubahan iklim dan hutan, pelaporan belum menjadi norma di antara perusahaan-perusahaan Indonesia. Walau mengalami peningkatan, jumlah perusahaan pelapor masih jauh dari cukup untuk dapat mencapai target lingkungan nasional. Membuat kewajiban pelaporan akan menjadi langkah besar dalam merealisasikan potensi pelaporan untuk mendorong perbaikan aksi lingkungan perusahaan.

Penerapan peraturan POJK 51/POJK.03/2017 menjanjikan langkah ke arah yang benar, yang mengamanatkan bahwa lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan terdaftar harus menyampaikan laporan keberlanjutan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, spesifikasi lebih lanjut diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna memahami kontribusi para aktor ini terhadap target TPB dan apakah mereka memiliki kerangka kerja terkait tata kelola, strategi, risiko, dan peluang. Dengan memastikan bahwa format wajib dan standar ada di seluruh sektor, pelaporan dapat diarusutamakan dan selanjutnya akan meningkatkan serta mendorong visibilitas yang lebih besar bagi pembuat kebijakan untuk menetapkan titik awal dan target, serta memantau kemajuan target TPB.

### **2 Memantau tindakan dan kemajuan perusahaan dalam pencapaian TPB**

Meskipun semakin banyak perusahaan melaporkan tindakan terkait TPB kepada CDP, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam data tersebut. Lebih dari separuh dari total perusahaan belum menetapkan target pengurangan emisi. Hal ini mengkhawatirkan mengingat tindakan perusahaan akan berpengaruh dalam memenuhi target penurunan emisi nasional. Ada berbagai alasan mengapa perusahaan mungkin tidak melaporkan tindakan yang berkaitan dengan TPB atau tindakan lingkungan lainnya. Tantangan untuk melaporkan data umumnya sangat rumit, termasuk kompleksitas rantai pasok, dan pengelolaan berbagai faktor emisi dari beragam kondisi geografis yang menyulitkan penghitungan total jejak karbon.

Pembuat kebijakan harus melakukan evaluasi yang terperinci terhadap setiap sektor bisnis untuk memperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai kemajuan setiap industri dalam mendukung tercapainya TPB. Dalam memberikan analisis yang lebih komprehensif, sistem pemantauan dapat ditingkatkan untuk memahami tindakan bisnis agar membantu

menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, dengan mengenali hambatan yang dihadapi perusahaan, pembuat kebijakan dapat membantu mendukung bisnis dalam memulai perjalanan keberlanjutannya, dan berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap TPB. Dengan menetapkan setiap target TPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.111/2022, pembuat kebijakan perlu memberikan pedoman tentang bagaimana menetapkan kontribusi aktor non-pemerintah (termasuk bisnis) kepada target dan menerapkan praktik berkelanjutan. Di saat yang sama, pembuat kebijakan harus memperkuat sistem basis data mengenai kemajuan TPB.

Pembuat kebijakan Indonesia dapat memanfaatkan data dan informasi yang disajikan oleh CDP untuk melengkapi data dari Sekretariat Nasional TPB. Signifikansi dan dampak nyata dari visi dan tindakan sektor swasta hanya dapat ditentukan jika data dan tindakan perusahaan dapat dipahami dengan jelas.

### **3 Meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan melalui pengembangan kapasitas**

Kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan di Indonesia masih tertinggal dari yang seharusnya dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap pencapaian TPB. Hal ini telah diakui secara luas, termasuk berdasarkan informasi lebih lanjut yang diberikan oleh data CDP yang menyoroti perlunya perbaikan dalam berbagai pendekatan perusahaan untuk mencapai tujuan terkait keberlanjutan. Data ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memahami berbagai perilaku dan tren perusahaan, dan untuk menunjukkan upaya apa saja yang diperlukan.

Ada kebutuhan mendesak untuk menutup kesenjangan dalam kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan Indonesia antara kondisi saat ini dan praktik terbaik. Hal ini dapat didukung oleh pembuat kebijakan melalui pengembangan kapasitas dan pelibatan para pemimpin bisnis. Pengembangan kapasitas harus terus dilakukan dan dirancang agar entitas yang ditargetkan tetap mendapat informasi tentang persyaratan peraturan baru. Ini dapat membantu memfasilitasi penerapan praktik global serta mengenali risiko terkait iklim dan hutan yang dapat menghambat kegiatan rantai pasok perusahaan.



# Daftar Pustaka

- 1 Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- 2 Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- 3 Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republic of Indonesia. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. (2022). Diperoleh pada 27 September 2022 dari [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf)
- 4 Laporan Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2021. *Sekretariat SDG Nasional*. (26 Juni 2021). Diperoleh pada September 2022 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/laporan-voluntary-national-review-vnr-indonesia-2021/>
- 5 Downar, B., Ernstberger, J., Reichelstein, S., Schwenen, S., & Zaklan, A. (2021). *The impact of carbon disclosure mandates on emissions and financial operating performance*. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1137-1175.
- 6 Informasi dari CDP Data to Assess Progress and Drive Action on The Sustainable Development Goals. *CDP*. (2021). Diperoleh pada September 2022 dari [https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/policy\\_briefings/documents/000/005/817/original/Final\\_SDG\\_Global\\_Policy\\_Brief\\_EN.pdf?1628505514](https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/policy_briefings/documents/000/005/817/original/Final_SDG_Global_Policy_Brief_EN.pdf?1628505514)
- 7 Measuring Corporate Progress Towards Indonesia's Sustainability Policies. *CDP*. (2021). Diperoleh pada September 2022 dari [https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/policy\\_briefings/documents/000/005/823/original/SDG\\_OJK\\_P\\_olicy\\_Brief\\_EN.pdf?1629458441](https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/policy_briefings/documents/000/005/823/original/SDG_OJK_P_olicy_Brief_EN.pdf?1629458441)
- 8 Are Some SDGs More Important than Others? Revealed Country Priorities from Four Years of VNRs. *United Nation Department of Economic and Social Affairs*. (2021). Diperoleh pada September 2022 dari <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/Note-SDGs-VNRs.pdf>
- 9 Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republic of Indonesia. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. (2022). Diperoleh pada 27 September 2022 dari [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf)
- 10 Song, L., Zhan, X., Zhang, H., Xu, M., Liu, J., & Zheng, C. (2022). How Much is global business sectors contributing to Sustainable Development Goals? *Sustainable Horizons*, 1, 100012. <https://doi.org/10.1016/j.horiz.2022.100012>
- 11 Song, L., Zhan, X., Zhang, H., Xu, M., Liu, J., & Zheng, C. (2022). How Much is global business sectors contributing to Sustainable Development Goals? *Sustainable Horizons*, 1, 100012. <https://doi.org/10.1016/j.horiz.2022.100012>
- 12 Indonesia's Sustainable Transformation. PwC. (2021). Diperoleh pada 27 September 2022 dari <https://www.pwc.com/id/en/publications/esg/indonesia-sustainable-transformation.pdf>
- 13 Produk Unggulan Indonesia. PPEJP. (tanpa tahun). Diperoleh pada 21 Oktober 2022 dari <http://ppejp.kemendag.go.id/produk-unggulan-indonesia/>
- 14 Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Makin Berkontribusi dalam Menjaga Suhu Global. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. (2022). Diperoleh pada September 2022 dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/4357-enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global.html>
- 15 Target absolut: menjelaskan penurunan emisi aktual di tahun mendatang jika dibandingkan dengan tahun dasar.
- 16 Target intensitas: menjelaskan penurunan emisi di masa mendatang yang sudah dinormalisasikan menjadi metrik bisnis jika dibandingkan dengan emisi metrik bisnis hasil normalisasi yang sama pada tahun dasar.
- 17 Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republic of Indonesia. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. (2022). Diperoleh pada 27 September 2022 dari [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf)
- 18 The Global Risk Report 2022 17th Edition. *World Economic Forum*. (2022). Diperoleh pada 24 September 2022 dari [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_The\\_Global\\_Risks\\_Report\\_2022.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf)
- 19 About Us - TCFD FSB. *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*. (tanpa tahun). Diperoleh pada Oktober 2022 dari <https://www.fsb-tcfd.org/about/>

- 20 About Us - TCFD FSB. *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*. (tanpa tahun). Diperoleh pada Oktober 2022 dari <https://www.fsb-tcf.org/about/>
- 21 Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy. *World Economic Forum*. (2020). Diperoleh pada September 2022 dari [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_New\\_Nature\\_Economy\\_Report\\_2020.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf)
- 22 Brockerhoff, E.G., Barbaro, L., Castagneyrol, B. et al. *Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services*. *Biodivers Conserv* 26, 3005–3035 (2017). <https://doi.org/10.1007/s10531-017-1453-2>
- 23 Working Group III Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). *Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)*. (2021). Diperoleh pada September 2022 dari [https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC\\_AR6\\_WGIII\\_FinalDraft\\_TechnicalSummary.pdf](https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_TechnicalSummary.pdf)
- 24 Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republic of Indonesia. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. (2022). Diperoleh pada 27 September 2022 dari [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf)
- 25 Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republic of Indonesia. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. (2022). Diperoleh pada 27 September 2022 dari [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf)
- 26 Rencana Operasional FOLU Net-Sink 2030. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. (2021). Diperoleh pada 28 September 2022 dari [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4335/rencana-operasional-indonesia-folu-net-sink-2030](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4335/rencana-operasional-indonesia-folu-net-sink-2030)
- 27 Praktik terbaik dalam menetapkan kebijakan adalah kebijakan tanpa deforestasi umum yang tersedia secara publik atau kebijakan tanpa deforestasi di tingkat perusahaan untuk komoditas tertentu, dengan unsur sosial, remediasi, dan restorasi. Komitmen untuk menghapus konversi ekosistem alami, komitmen untuk menghapus deforestasi, komitmen tanpa deforestasi, komitmen untuk tidak menanam di lahan gambut, dan komitmen tanpa eksploitasi (NDPE), komitmen terhadap remediasi, restorasi, dan/atau kompensasi atau kerugian di masa lalu, komitmen untuk melindungi hak dan mata pencaharian masyarakat setempat.
- 28 Peraturan Presiden No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (2020).
- 29 Kuesioner Hutan CDP 2021. *CDP*. (tanpa tahun). Diperoleh dari <https://guidance.cdp.net/en/guidance?cid=18&ctype=theme&idtype=ThemeID&incchild=1&microsite=0&otype=Questionnaire&tags=TAG-646%2CTAG-605%2CTAG-600>
- 30 Bank Tabungan Negara 2021 Sustainability Report: <https://www.btn.co.id/-/media/User-Defined/Document/Hubungan-Investor/eng/Annual-Report/2021/SR-BTN-2021--ENG.pdf>
- 31 Sustainability Report. *ANJ*. (tanpa tahun). Diperoleh dari <https://anj-group.com/en/sustainability-report>
- 32 Kuesioner Hutan CDP 2021. *CDP*. (tanpa tahun). Diperoleh dari <https://guidance.cdp.net/en/tags?cid=19&ctype=theme&gettags=0&idtype=ThemeID&incchild=1&microsite=0&otype=Questionnaire&page=1&tgprompt=TG-124%2CTG-127%2CTG-125>
- 33 Kuesioner Hutan CDP 2021. *CDP*. (tanpa tahun). Diperoleh dari <https://guidance.cdp.net/en/guidance?cid=19&ctype=theme&idtype=ThemeID&incchild=1%2C%2B5site=0&otype=Questionnaire&tags=TAG-646%2CTAG-609%2CTAG-599>
- 34 Sustainability Report. *ANJ*. (tanpa tahun). Diperoleh dari <https://anj-group.com/id/sustainability-report-1>
- 35 2021 CDP Forests Questionnaire. *CDP*. (tanpa tahun). Diperoleh dari <https://guidance.cdp.net/en/guidance?cid=19&ctype=theme&idtype=ThemeID&incchild=1%2C%2B5site=0&otype=Questionnaire&tags=TAG-646%2CTAG-609%2CTAG-599>
- 36 APP Sinar Mas 2021 Sustainability Report. <https://asiapulppaper.com/o/web.sinarimas.sustainabilityreport2021/assets/document/APP-Sinar-Mas-SR2021.pdf>
- 37 Kuesioner Perubahan Iklim CDP 2021
- 38 Kuesioner Hutan CDP 2021
- 39 Kuesioner Perubahan Iklim CDP 2021
- 40 Kuesioner Perubahan Iklim CDP 2021
- 41 Target TPB Indonesia terbaru yang juga terdapat dalam Peraturan Presiden No. 111/2022 tentang Pelaksanaan TPB

**Penyusun:****Nur Maliki Arifiandi**

Policy Engagement Manager, Forests

[Nur.arifiandi@cdp.net](mailto:Nur.arifiandi@cdp.net)**Devyandra Putri**Policy and Public Affair Officer,  
Forests[Devyandra.putri@cdp.net](mailto:Devyandra.putri@cdp.net)**Untuk informasi lebih lanjut hubungi:****CDP****Helen Finlay**Global Associate Director-Policy  
Engagement[Helen.finlay@cdp.net](mailto:Helen.finlay@cdp.net)**Nur Maliki Arifiandi**

Policy Engagement Manager, Forests

[Nur.arifiandi@cdp.net](mailto:Nur.arifiandi@cdp.net)**Ucapan Terima Kasih:**

IBCSO

Rini Setiawati

Hugo Rosa da Conceicao

Helen Finlay

Tomasz Sawicki

Thomas Maddox

Maddy Bravery

Henry Fogarty

Thomas Winward

**Indonesia Business Council for Sustainable development (IBCSO):****Indah Budiani**

Executive Director

[Indah.budiani@ibcsd.or.id](mailto:Indah.budiani@ibcsd.or.id)**CDP Southeast Asia and Oceania**13/F, Chinachem Tower  
34-37 Connaught Rd Central  
Central  
Hong Kong  
[www.cdp.net](http://www.cdp.net) the David & Lucile Packard  
FOUNDATION**Tentang CDP**

CDP adalah organisasi nirlaba internasional yang menerapkan sistem pelaporan lingkungan untuk perusahaan, kota, negara, dan wilayah. Didirikan pada tahun 2000, CDP bekerja sama dengan 590 investor yang memiliki aset 110 triliun Dolar AS. CDP memelopori penggunaan pasar modal dan pengadaan perusahaan untuk memotivasi perusahaan agar melaporkan dampak lingkungannya dan mengurangi emisi GRK, menjaga sumber daya air, dan melindungi hutan. Lebih dari 19.000 perusahaan di seluruh dunia melaporkan data kepada CDP pada tahun 2022, termasuk lebih dari 18.700 perusahaan atau setara lebih dari setengah kapitalisasi pasar global, dan lebih dari 1.100 kota, kabupaten dan provinsi. CDP sepenuhnya sejalan dengan TCFD dan mengelola basis data lingkungan terbesar di dunia. Skor yang diberikan CDP secara luas digunakan untuk mendorong keputusan investasi dan pengadaan menuju ekonomi nol karbon, berkelanjutan, dan berketahanan. CDP adalah salah satu pendiri inisiatif Science Based Targets initiative, We Mean Business Coalition, Investor Agenda, dan Net Zero Asset Managers initiative.

Kunjungi [cdp.net](http://cdp.net) atau ikuti kami di @CDP untuk informasi lebih lanjut.

**Tentang IBCSD:**

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSO), asosiasi yang dipimpin oleh para CEO yang memiliki komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Asosiasi berbagi komitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologi dan kemajuan sosial. IBCSD merupakan bagian dari WBCSD dan didirikan oleh 6 anggota pendiri IBCSD termasuk: Bakrie Telecom, Bank Negara Indonesia, Medco Power Indonesia, Holcim Indonesia, Garuda Indonesia dan PT Riau Andalan Pulp Paper.